

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi penting bagi suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan ekonomi juga suatu upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia, dengan pembangunan akan menciptakan lapangan pekerjaan serta kemakmuran bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi menurut (Todaro dan Smith, 2012) adalah studi tentang bagaimana ekonomi dari stagnasi agar dapat berkembang dari berpendapatan rendah naik ke status berpendapatan tinggi, serta mampu mengatasi masalah kemiskinan. Cakupan pembangunan ekonomi begitu luas, selain berkaitan dengan alokasi efisien produk juga terdapat sumber daya, mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan baik publik maupun pribadi.

Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa agar kehidupan masyarakat lebih baik maka harus memiliki tiga tujuan dalam pembangunan: (1)meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang – barang dasar sebagai penopang kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan; (2)meningkatkan taraf hidup seperti pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lapangan pekerjaan lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan perhatian besar kepada budaya dan nilai – nilai kemanusiaan; (3)membebaskan individu dari perbudakan dan ketergantungan yang bukan hanya antar hubungan individu dan

antar negara-bangsa tetapi juga dari kekuatan ketidaktahuan dan kesengsaraan manusia.

Pelaksanaan pembangunan ingin mewujudkan kehidupan bangsa dari berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh untuk mewujudkan negara yang lebih maju. Oleh karenanya, setiap negara memiliki pembangunan nasional yang berbeda - beda. Strategi pembangunan yang dijalankan harus menjamin kesamaan dan keadilan serta memelihara keragaman masyarakat. Karena itu Pembangunan nasional hakikatnya adalah pembangunan manusia yang seutuhnya dan seluruhnya dalam kehidupan berbangsa. Sama seperti negara lain, negara Indonesia juga memiliki pembangunan nasional yang telah terencana.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam pancasila sila ke-5 yaitu "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" dimana maksud dari sila tersebut ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang menjelaskan fungsi serta menjadi tujuan negara Indonesia. Selain itu, pada alenia ini juga menegaskan bahwa Indonesia negara berbentuk republik dengan dasar falsafah negara Indonesia adalah Pancasila.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada September tahun 2020 saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, dimana 26,42 juta jiwa (9,78 %) penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,63 juta orang atau sebesar 0,56 % dibandingkan tahun 2019. Diketahui bahwa laju pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Selain itu, pengangguran menjadi masalah serius bagi Indonesia. Hal ini terjadi karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Pembangunan sektor ekonomi di Indonesia tidak lepas dari strategi dan kebijakan pemerintah. Luasnya wilayah dan banyaknya potensi Indonesia tidak menjamin bahwa lapangan pekerjaan terbuka sangat lebar. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi masalah. Desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan keuntungan bagi setiap wilayah. Sistem desentralisasi menjadikan pemerintah daerah mampu memberikan strategi dan kebijakan yang tepat, karena dinilai mengetahui apa saja kelebihan, kelemahan, dan potensi yang ada.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan ekonomi dengan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peranan yang sangat penting karena UMKM sebagai sektor swasta yang menjadi

sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong roda perekonomian dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Potensi UMKM yang begitu besar dapat lebih untuk dikembangkan namun tidak dapat dilakukan dengan begitu mudah. Disamping potensi yang besar, UMKM juga memiliki permasalahan dan kendala yang dihadapi seperti masalah produksi, pemasaran, pengemasan, jaringan kerja, serta masalah permodalan. Sehingga perkembangan UMKM tidak dapat berjalan dengan lancar begitu saja.

Tahun 2019 semua kegiatan berbagai sektor dan ruang publik di Indonesia berjalan dengan normal dan semestinya. Namun, awal tahun 2020 perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia telah dimulai. Dimana tahun 2020 pandemi Covid – 19 menyerang Indonesia. Pengaruh Covid – 19 memaksa pemerintah untuk merubah strategi dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Kebijakan PSBB sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian masyarakat karena terjadi penurunan pendapatan, mengingat berbagai ruang publik seperti mall, tempat wisata, kantor, tempat ibadah, sekolah, rumah makan, transportasi umum dan juga tidak terkecuali bagi UMKM.

Sebagian besar wilayah Indonesia merasakan dampak Covid – 19 begitu pula dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. D.I.Yogyakarta merupakan sebuah kota pelajar dengan memiliki banyak aset budaya dan pariwisata sehingga dapat mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. UMKM menjadi sektor penting mensokong perekonomian di D.I.Yogyakarta karena dapat dengan mudah untuk dijumpai.

Meningkatnya jumlah UMKM memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Namun, adanya Pandemi Covid – 19 membuat sebagian UMKM menutup usahanya karena sepi pembeli dan kerugian yang dialami. Mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat strategi dan kebijakan baru. Pada tanggal 14 Mei 2020 Gubernur D.I.Yogyakarta mengeluarkan surat edaran Nomor 519/7669 Tentang Himbauan Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY. Pembelian produk UMKM DIY sebagai upaya mendorong berjalannya perekonomian daerah dan membantu pemulihan sosial ekonomi.

Pengaruh tahun 2019 sebelum pandemi Covid - 19 dan tahun 2020 pasca pandemi Covid – 19 juga dirasakan UMKM pada setiap wilayah kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta. Salah satunya adalah kabupaten Bantul, pada tahun 2019 Kabupaten bantul memiliki jumlah UMKM 49.000 unit dan tahun 2020 meningkat menjadi 50.000 unit. Hal tersebut menandakan bahwa potensi Kabupaten Bantul dapat terus dikembangkan.

Wilayah lahan yang subur menjadi potensi menjanjikan bagi para petani. Tidak hanya itu, bagian selatan merupakan wilayah pesisir yang terkenal dengan wisata bahari. Sedangkan dari sektor industri Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kerajinan mikro dan kecil seperti kerajinan gerabah di Kasongan dan Pundong, kerajinan batik di Imogiri dan Pandak, kerajinan wayang di Imogiri, serta kerajinan topeng batik di Pajangan. Terjadinya pandemi Covid – 19 tahun 2020 mau tidak mau menjadikan pemerintah Kabupaten Bantul untuk merubah strategi dalam pengembangan UMKM. Pembatasan sosial dan larangan adanya kerumunan juga menyebabkan sepi pembeli produk UMKM. Disisi lain

pemerintah dituntut untuk mengatasi masalah perekonomian dimana banyak keluhan masyarakat seperti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan. Perubahan strategi pada tahun 2019 dan tahun 2020 membawa dampak yang besar dan tidak begitu mudah untuk dijalankan. Keterkejutan berbagai langkah baru Pemerintah Kabupaten Bantul mengharuskan masyarakat untuk mentaatinya demi menekan penyebaran kasus Covid – 19.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul "Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2019 - 2020."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2019 - 2020?
2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bantul tahun 2019 - 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dapat meningkatkan kualitas produk UMKM. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi kalangan akademik untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman menulis serta dapat memberikan masukan untuk pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan UMKM agar memiliki hasil produksi yang baik sehingga daya jual dipasaran juga bernilai tinggi.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan UMKM yang dimiliki serta dapat ikut andil dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan terdapat beberapa sumber yang menjadi rujukan dan referensi tentang strategi pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari berbagai sumber tersebut terdapat berbagai macam penilaian terhadap strategi pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, dimana setiap strategi yang pemerintah lakukan tentulah berbeda - beda dengan satu yang lainnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, dan lain sebagainya.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	(Suci Astari, 2019)	Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Repository UIN Sumatera Utara	Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam pengembangan UKM meliputi: a) strategi perkuatan, dengan pengembangan program promosi produk; b) strategi pemberdayaan, melakukan penyelenggaraan pelatihan; c) strategi perlindungan, penciptaan iklim usaha yang kondusif.
2	(Regant Yudha Priatama, 2017)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi pada Kantor Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo).	Repository universitas brawijaya	Strategi pemerintah Desa Ngrayun dalam mengembangkan UMKM dengan mengembangkan pemasaran. Bantuan yang diberikan seperti memberi informasi pasar, bantuan promosi dengan mengikuti pameran lokal, regional, maupun nasional, serta membantu dalam menjalin kerjasama dengan supermarket dan toko oleh oleh. Strategi lainnya yaitu dalam mengembangkan sumber daya manusia, dengan pelatihan.

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
3	(Khoirul Anam, 2019)	Strategi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara.	Journal of Politic and Government Studies	Pemerintah Kabupaten Jepara membuat strategi dengan perencanaan yang dilakukan ketika sesuatu hal telah terjadi sehingga mengetahui tindakan apa yang akan diambil. Sebagai fasilitator pemerintah berperan memfasilitasi UMKM dalam hal yang dibutuhkan. Sebagai regulator yaitu membuat kebijakan sehingga mempermudah UMKM. Selanjutnya, pemerintah sebagai katalisator, ikut terlibatnya pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.
4	(Ibnu supriyadi, 2018)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	Jurnal STIA Pembangunan Jember	Pelaksanaan UMKM di Desa Sruni memiliki kesulitan dalam modal, pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kurangnya teknis ahli, keterampilan manajemen tidak maksimal, dan iklim yang tidak kondusif. Pendampingan UMKM dilakukan untuk memfasilitasi proses belajar melalui pelatihan, dan workshop serta menjadi mediator antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
5	(Adhe Anggreini Saragi, 2016)	Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Kerajinan Batu Bata Berdasarkan Analisis SWOT (Kasus Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).	Repository Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	UKM batu bata di Kecamatan Piyungan menerapkan strategi berupa memperluas pasar agar produk semakin terkenal, melakukan pengembangan dengan kualitas yang lebih baik, memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak dan memperbanyak modal. SDM yang melimpah, SDA banyak, teknologi yang memadai menjadi keuntungan. Sementara itu, kurangnya daerah pemasaran hanya mencakup D.I Yogyakarta.
6	(Warcito, 2016)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pada Pengolahan Pangan	Jurnal Manajemen Universitas IBN Khaldun	Strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT dimana faktor internal , kekuatan ada produk bermutu, modal milik sendiri, harga bersaing, varian prodk. Faktor kelemahan ada manajemen kurang efektif, terbatasnya tenaga dan modal, kurang promosi, dan produk mudah ditiru. Faktor eksternal, peluang terdapat dukungan pemerintah, terbatasnya kredit, perilaku belanja, perkembangan teknologi, dan banyaknya outlet produk. Bagian faktor ancaman adanya tingkat persaingan, pendatang baru, produk sama.

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
7	(Fathatur Rhohmah, Tjahjanulin Domai, Sukanto, 2015)	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)	Jurnal Administrasi Publik (JAP)	4 strategi dalam pemberdayaan yaitu, strategi kemampuan peningkatan finansial; pengembangan pemasaran; pengembangan sumberdaya manusia; pengaturan dan pengendalian. Pemerintah daerah melakukan pelatihan dan manajemen, ada pinjaman bank JATIM, pengembangan pasar melalui event pameran lokal dan nasional. Serta adanya kemudahan dalam perijinan.
8	(Wahyu Eko Cahyono & Dedy Kunhadi, 2020)	Strategi Pengembangan UKM Gethuk Pisang Guna Melestarikan Makanan Tradisional	Jurnal Media Teknik dan Industri	strategi dalam mengembangkan gethuk pisang berdasar analisis SWOT yaitu, pemerintah mengadakan festival makanan tradisional, mutu produk ditingkatkan, memanfaatkan media online. menjaga kualitas produk, meningkatkan jiwa kewirausahaan, menggunakan bahan baku lokal, mengurangi marjin keuntungan. mengembangkan kualitas SDM, adanya kredit usaha rakyat, melakukan kerjasama kepada perguruan tinggi.

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
9	(Lili Marlinah, 2020)	Peluang dan Tantangan UMKM dalam Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19	Jurnal Ekonomi	Masa pandemi covid 19 pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan umkm agar tetap terus berjalan, mengingat umkm sebagai penggerak roda perekonomian. Pemberian bantuan dana pada umkm merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah, selain itu pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan pada saat pandemi covid 19.
10	(Alyas & Muhammad Rakib, 2017)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha roti Maros di Kabupaten Maros)	Sosiohumani ora Jurnal of social sciences and humanities	Beberapa strategi dalam pengembangan usaha roti maros, yaitu: a) lokasi yang strategis; b) memaksimalkan bantuan modal dari pemerintah; c) meningkatkan kapasitas penjualan; d)memaksimalkan jumlah pelanggan tetap; e) melakukan inovasi dan variasi produk; f) pemanfaatan teknologi untuk promosi; dan g) penerapan sistemn manajemen usaha terutama dalam hal keuangan dan administrasi.

Pada tabel terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan studi yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian yang akan

saya lakukan berfokus pada strategi Pemerintah Kabupaten Bantul pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Kabupaten Bantul memiliki ukm dengan potensi sumber daya yang memadai untuk dapat dikembangkan. Selain itu, sumber daya alam di wilayah Kabupaten Bantul memiliki pesona tersendiri untuk ikut dalam pengembangan ukm dalam membantu masyarakat. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah mengingat potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantul sangat besar..

F. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

a. Definisi Strategi

Secara etimologi kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratagos* yang berarti ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan sumber daya yang terbatas (Sihombing, 2000) dalam (Sedjati, 2015). Mengutip dalam Rangkuti (2006:3-4) terdapat beberapa para ahli mengenai pengertian definisi. Menurut Chanler (1962) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965) berpendapat bahwa strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Jadi dengan begitu salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah

bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Selain itu, Porter (1985) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Strategi juga merupakan kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya. Baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Andrews, 1980 dan Chaffe, 1985).

Menurut Hamel dan Prahalad (1995) strategi adalah tindakan yang memiliki sifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus – menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan pada masa yang akan datang. Dengan begitu dalam merencanakan strategi kebanyakan dimulai dengan "apa yang dapat terjadi", bukan dimulai dari "apa yang terjadi". Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Dimana perusahaan harus mencari kompeten inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari definisi – definisi strategi diatas dapat dikatakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan bersaing dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan melakukan tindakan yang dapat mendapatkan keuntungan baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk pihak lain.

b. Tipe – Tipe Strategi

Menurut Salusu (1996:105) tipe – tipe strategi adalah:

1. Corporate Strategy (strategi organisasi)

Corporate strategy merupakan strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai- nilai, dan inisiatif – inisiatif strategik yang baru. Dalam hal ini pembatasan – pembatasan diperlukan, seperti apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Program Strategy (Strategi program)

Program strategy ini lebih memberi perhatian pada implikasi – implikasi strategik dari suatu program tertentu. Seperti, apa kira – kira dampaknya apabila suatu program dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Resource Support (Strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber – sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. Institutional Strategy (Strategi kelembagaan)

Fokus dari institusional strategy adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategik.

c. Tahap Strategi

Menurut Bambang Hariadi (2005) langkah -langkah dalam menentukan strategi:

A. Perumusan

- 1) Tahap pertama ini mencangkup analisis lingkungan intern dan ekstern adalah penetapan visi misi, perencanaan dan tujuan strategi.
- 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksud untuk membangun visi misi, merupakan tujuan strategi dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.
- 3) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki, tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- 5) Tentukan tujuan dan target.
- 6) Seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa depan dan misi apa yang harus dilakukan sekarang untuk mencapai cita –cita tersebut.

B. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya merupakan tahap krusial dalam strategi adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur pengembangan

program, budget dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan.

d. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2013), analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi dalam sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi produk sendiri maupun pesaing.

Analisis SWOT juga bisa diartikan suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. SWOT merupakan singkatan dari *Strength (S)*, *Weakness (W)*, *Opportunities (O)*, dan *Threats (T)* yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan. Analisis ini secara sistematis dapat membantu mengidentifikasi faktor dalam (internal) yaitu kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara itu, faktor luar (eksternal) meliputi peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats). Analisis ini dapat untuk mempertimbangkan segala potensi yang timbul dan melihat segala kemungkinan yang ada. Sehingga, perencanaan dapat terukur dan efektif.

Hal tersebut dipakai untuk menyusun suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Analisis SWOT biasanya digunakan untuk mengevaluasi dari segi internal dan eksternal suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai isu – isu penting, sehingga mampu mengetahui strategi apa yang akan dilakukan kedepannya. Dalam perusahaan/organisasi analisis dimulai dari unsur – unsur internal kemudian barulah dari unsur – unsur eksternal.

2. Sistem Pemerintah Daerah

a. Definisi Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah memiliki pengertian sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah penguasa yang memerintah di daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dari Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU No 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat dimana terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah. Dengan begitu DPRD dan kepala daerah dapat dikerahui mempunyai kedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD memiliki fungsi untuk membentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan, kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Wewenang merupakan bagian penting dalam tata hukum pemerintahan (hukum administrasi), karena pada dasarnya pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang dipeolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah dapat diukur

berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.

Menurut pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu dalam hal politik dan administratif. Desentralisasi politik adalah wewenang yang diberikan untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintahan lokal dan regional. Sedangkan desentralisasi administratif adalah wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada

pejabat pusat pada tingkat lokal, mulai dari penetapan peraturan sampai dengan keputusan substansial.

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi juga bisa diartikan sebagai daerah otonom yang diberikan wewenang tertentu oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Selain itu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi merupakan wujud penyerahan suatu kekuasaan kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya (pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) untuk mengatur wilayahnya sendiri secara bebas tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. konsep otonomi daerah telah tertuang dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat (5) “pemerintah daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat.”. Terdapat juga pada ayat (6) bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

d. Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan perangkat daerah dilakukan oleh setiap daerah dengan berbagai pertimbangan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan pemerintah pada tingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi yang dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah tingkat provinsi, dan badan-badan daerah provinsi.

Pada perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 208 ayat (1) “Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah.”

Dari penjelasan diketahui bahwa perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD provinsi dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan

perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada pengelompokan organisasi yang terdiri dari lima elemen, yaitu: a) kepala daerah; b) sekretaris daerah; c) dinas daerah; d) badan/fungsi penunjang; dan e) staff pendukung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dinas daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi inti membantu kepala daerah. Dimana dinas daerah memiliki fungsi mengurus dan mengatur sesuai bidang urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia definisi UMKM berbeda – beda yang satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan lembaga atau instansi dan Undang – Undang yang memiliki definisi dari UMKM tersebut. Diantaranya adalah, Undang – Undang No 20 Tahun 2008, Badan Pusat Statistik (BPS), Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

1) Undang – Undang No 20 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang ini. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

2) Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

- a) Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang.
- b) Usaha menengah memiliki jumlah pekerja 20 sampai 99 orang.

3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah telah terjadi perubahan yang dituangkan dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi " Kriteria usaha mikro, kecil, dan

menengah dapat memuat modal usaha , omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha."

b. Tujuan UKM

Tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 yang berbunyi " Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

c. Klasifikasi UKM

Menurut (Rahmana,2008) dalam (Susanto,et al.2016) perkembangan UKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Livelihood activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, pada umumnya dikenal sebagai sektor informal.
2. Micro enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast moving enterprise, merupakan UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bersiap menjadi usaha besar.

d. Permasalahan UKM

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi UKM menurut Kristiyanti (2012) dalam Saputri (2016), diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Internal

a) Kurangnya modal dan terbatasnya pembiayaan

Modal merupakan faktor utama dalam melakukan suatu usaha. Seperti diketahui usaha kecil dan usaha menengah dalam melakukan dan mengembangkan usahanya biasanya memakai modal yang dimiliki sendiri yang jumlahnya terbatas. Sementara peminjaman modal pada bank atau lembaga lainnya terkadang sulit untuk diperoleh karena berbagai kendala seperti syarat administratif yang semuanya tidak dapat terpenuhi.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam Usaha Kecil Menengah dapat disebabkan berbagai hal seperti kurangnya mendapatkan pendidikan formal, kurangnya pengetahuan yang dimiliki serta keterampilan yang dimiliki juga belum maksimal. Keterbatasan SDM tersebut juga bisa mempengaruhi manajemen pengelolaan usaha UKM, sehingga usaha yang ada kurang maksimal untuk berkembang.

2) Faktor Eksternal

a) Iklim usaha belum kondusif

Kebijakan pemerintah dalam memajukan UKM setiap tahun akan selalu dievaluasi tetapi belum sepenuhnya kondusif. Hal tersebut dapat terjadi karena masih adanya persaingan yang tidak sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah dengan pengusaha besar. Tidak hanya itu terkadang kepentingan pengusaha besar lebih diutamakan dari pada pengusaha kecil.

b) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan maraknya digitalisasi membuat sarana dan prasarana yang ada pada pelaku UKM kurang berkembang bahkan dapat menurun karena tidak mengetahui perkembangan yang ada

c) Implikasi otonomi daerah

Kekuasaan penuh pada pemerintah daerah diharapkan dapat memahami potensi yang dimiliki, selama ini pemerintah daerah membuat regulasi agar UKM dapat berkembang dan bertahan. Namun terkadang sistem yang memudahkan investasi sehingga banyak investor yang masuk ke daerah memberikan dampak kepada usaha kecil dan menengah. Akibatnya daya saing semakin ketat antara pelaku usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha besar (investor).

d) Implikasi perdagangan bebas

Dibukanya perdagangan bebas antar ASEAN menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Adanya hal tersebut pemerintah menerbitkan dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020. Perdagangan bebas memang menguntungkan, namun disatu sisi dapat merugikan masyarakat. Seperti pelaku usaha kecil dan menengah yang dapat kalah bersaing dan dituntut untuk melakukan produksi kreatif serta dituntut memiliki standar kualitas pasar global.

e) Sifat produk yang tidak bertahan lama

Sebagian produk yang dihasilkan oleh industri kecil seperti UKM biasanya memiliki ciri dan karakteristik berupa produk kerajinan dan produk olahan makanan dan minuman namun dengan ketahanan yang tidak lama atau pendek. Sehingga produk yang dihasilkan dapat mudah rusak dan tidak dapat bertahan.

f) Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar bagi pelaku UKM juga menjadi masalah yang serius karena produk tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional, bahkan akses dipasar nasional juga tidak semuanya dapat terjangkau.

e. Peran Penting UMKM

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari segi jumlah usaha dan tersediannya lowongan pekerjaan yang ditimbulkan. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan." Maksud dari UU tersebut ingin adanya UMKM dapat ikut andil dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat serta berlandaskan asas demokrasi yang adil bagi setiap lapisan masyarakat.

Menurut Bappenas kontribusi UMKM pada perekonomian sangat besar, adanya UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan mendukung pencapaian distribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan. Selain itu, UMKM juga memberikan peluang kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja karena terbukanya lapangan pekerjaan dan juga sebagai sarana bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan ekonomi kreatif. Keberadaan UMKM juga menyumbang devisa bagi negara sebab barang yang diproduksi tidak hanya dipasarkan dalam negeri saja namun telah menjangkau pasar luar negeri (ekspor).

4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Pengembangan

Pengembangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, seperti pada pemerintah yang selalu berusaha dalam melakukan pembangunan yang bertahap dan teratur dalam mencapai sasaran. Dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM disebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Disebutkan juga dalam UU No 20 Tahun 2008 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: 1. Produksi dan pengolahan; 2. Pemasaran; 3. Sumber Daya Manusia; dan 4. Desain dan teknologi. Imsar (2018) menyatakan bahwa pengembangan usaha merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha, kualitas, dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan.

b. Bentuk Pengembangan

Pengembangan industri UMKM merupakan salah satu strategi dan kebijakan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Peran industri UMKM dalam nasional memberikan kontribusi yang besar dan hal tersebut tidak perlu untuk diragukan lagi. Potensi yang dimiliki begitu besar dan tersebar diberbagai wilayah sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Upaya pengembangan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dimana memiliki bentuk-bentuk pengembangan (Syarif,1991) dalam (Priatma,2017) yang meliputi:

1. Perangkat Lunak, yaitu : a) Adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan; b) Pembinaan usaha; c; Bantuan promosi; dan e) Keringanan dan kemudahan yang diberikan dalam rangka endorong berkembangnya usaha.
2. Perangkat Keras, meliputi: a) Menyediakan fasilitas bersama, seperti koperasi sentra usaha; dan b) Adanya bantuan langsung kepada para pengusaha seperti modal.

c. Strategi Pengembangan

Melakukan suatu usaha perlulah dilakukan menyusun kiat-kiat strategi yang akan dilakukan agar usaha semakin berkembang. Seperti pada penjelasan berikut terdapat berbagai pendapat mengenai strategi pengembangan usaha. Menurut Sjaifudian (1995:66-69) dalam Priatama

(2017) terdapat strategi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

Kemampuan finansial merupakan salah satu hal terpenting dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, karenan dengan finansial yang memadai dapat mengembangkan usaha tersebut. Untuk mendapatkan modal juga dilakukan dengan berbagai upaya seperti cara pinjaman pada bank atau lembaga lain atau hibah.

2) Strategi pengembangan Pasar

Adanya pasar bebas akan memberikan kesempatan yang besar bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan pasar. Hal ini pemerintah dapat mendukung dan menunjang para pemilik usaha dengan gencar melakukan promosi usaha.

3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan menengah sebagian masih rendah baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena hal itu berperan langsung dalam usaha tersebut. Pemerintah dalam melaksanakan upaya peningkatan sumber daya manusia bisa melakukan pelatihan, diklat, dan seminar.

4) Strategi Pengaturan dan Perijinan

Strategi pengaturan dan perijinan dapat dilakukan dengan cara selalu memantau perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk

mengetahui kondisi usaha yang sesungguhnya. Dalam hal perijinan dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin untuk mendirikan dan pengembangan usaha.

Selain itu pengembangan usaha dapat dilakukan dengan teknik peningkatan skala usaha dan perluasan cakupan usaha (Suryana, 2013:221).

1. Peningkatan skala usaha

Peningkatan skala usaha dalam pengembangan usaha dilakukan dengan peningkatan skala produksi (jenis barang dan jasa), tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha (penambahan lokasi usaha).

2. Perluasan cakupan usaha

Perluasan cakupan usaha ini mengenai biaya produksi atau modal yang digunakan dalam usaha. Perluasan usaha yang dilakukan berkaitan dengan adanya jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari usaha sebelumnya.

Peningkatan pengembangan usaha menurut penelitian Agustina (2016) dalam Pariyem (2019) terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. peningkatan pendapatan
2. peningkatan jumlah pelanggan
3. peningkatan kualitas produk
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia

G. Definisi Konseptual

1. Strategi

Strategi adalah rencana yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai tujuan dalam pengembangan UMKM.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah semua pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

4. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM adalah proses memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul kepada UMKM di Kabupaten Bantul.

H. Definisi Operasional

1. Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

- a) Akses kemudahan dalam mendapatkan modal.
- b) Bantuan modal pemerintah bagi UMKM

2) Strategi pengembangan Pasar

- a) Media saluran promosi produk.
- b) Perlindungan pasar.

3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Pengontrolan dan pengkoordinasian pemerintah.

b) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM.

4) Strategi Pengaturan dan Perijinan

a) Pengaturan perijinan.

b) Fungsi kelembagaan.

2. Analisis SWOT :

a. Faktor Internal

1. Strength (kekuatan)

a) Kabupaten Bantul memiliki potensi sumber daya alam.

b) Memanfaatkan sumber daya manusia pada Kabupaten Bantul.

2. Weakness (kelemahan)

a) Penerapan ilmu setelah pelatihan kurang.

b) Modal yang dimiliki minim

b. Faktor Eksternal

1. Opportunities (peluang)

a) Pemasaran produk bekerjasama dengan berbagai pihak.

b) Antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan.

c) Sumber daya alam dimanfaatkan dengan baik.

2. Threats (tantangan/ancaman)

a) Penjualan produk tidak setiap hari laku.

b) Pembatasan sosial selama pandemi covid-19

c) Penurunan produksi.

d) Munculnya pengusaha baru.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menekankan pada menganalisa secara rinci tentang objek yang akan diteliti dan bagaimana kondisinya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kondisi saat ini. Menurut Kusmayadi dan Endar Sugiarto (2000) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, akurat, dan faktual.

Dari pengertian tersebut peneliti menyajikan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dari narasumber mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini melakukan penyusunan kata – kata untuk menjelaskan dan menggambarkan hasil dari apa yang telah diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul bertempat di Komplek Pemda II Manding Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan UKM di Kabupaten Bantul.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari narasumber yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dibutuhkan oleh peneliti dimana data ini sebagai penunjang dan pelengkap, dimana sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, angket, foto, peraturan dan sebagainya.

4. Unit Analisa Data

Unit analisis data adalah subjek yang akan diteliti didalam penelitian yang berkaitan dengan masalah dengan kasus dalam penelitian. Dengan demikian unit analisis data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah dalam Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Serta dari pihak masyarakat yang memiliki UMKM di wilayah Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan mengenai pengembangan UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan masyarakat pemilik ukm. Adapun narasumber yang berkaitan dengan penelitian adalah:

Tabel 1.2
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Ibu Dwi Suryani	Dinas Koperasi,UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2	Ibu Sunarsih	Masyarakat pemilik usaha di Kabupaten Bantul “Pro Craft Terracotta Handmade”
3	Ibu ayunar	Masyarakat pemilik usaha di Kabupaten Bantul “batik Sungsang”
4	Saudari Afifah dan saudari Apri	Masyarakat pemilik usaha di Kabupaten Bantul “Kitchen Nona”

b. Teknik Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan tempat, peristiwa, masalah, fakta dan objek yang ada. Dalam melakukan observasi tidak semua hal akan diamati karena pengamatan hanya dilakukan pada cakupan masalah dalam penelitian yang ada. Observasi tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga bisa melakukan pencatatan secara langsung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data – data yang mendukung dalam penelitian ini, data dokumentasi dapat berupa sebuah tulisan, gambar, atau karya – karya lainnya. Dokumentasi tulisan dapat berupa peraturan, kebijakan, cerita, biografi, dan sejarah.

Dokumentasi gambar dapat berupa foto, sketsa, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi karya dapat berupa karya seni yang diciptakan seperti lukisan, patung, film, dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan usaha untuk mencari dan menata secara sistematis dari hasil catatan, observasi, wawancara, dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya (Noeng Muhadjir,1998). Sedangkan analisis data menurut Sarwono (2006) dalam Priatama (2017) mengatakan bahwa analisis data adalah usaha untuk proses pengolahan data, penyerdehanaan, pembatasan, dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah diperoleh dari hasil penelitian.